

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia merupakan daerah yang rentan terhadap risiko bencana. Tingginya intensitas bencana yang terjadi tidak terlepas dari faktor letak geologis negara Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik aktif, jalur pegunungan aktif, dan kawasan ber iklim tropis, sehingga menjadikan sebagian wilayah rawan terhadap kejadian bencana alam¹. Peristiwa seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor adalah berbagai bencana yang kerap kali terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa 85% bencana yang terjadi selama lima tahun terakhir ini terjadi sebagai akibat dari kerusakan lingkungan hidup dan hampir 80% penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana². Hal ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium bencana di mana setiap orang belajar tentang berbagai jenis bencana dan akibat yang mengikutinya seperti bencana gempa bumi dan tsunami. Pada tabel 1.1 berikut dapat dilihat kejadian bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.

1 Ainun Rosyida, Ratih Nurmasari, Suprpto. 2019. Analisis Perbandingan Dampak Kejadian Bencana Hidrometeorologi Dan Geologi Di Indonesia Dilihat Dari Jumlah Korban Dan Kerusakan (Studi: Data Kejadian Bencana Indonesia 2018). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol 10 (1) : 12-21

2 Roni Ekha Putera. 2018. *Mitigasi Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Dari Perspektif Implementasi Kebijakan*. Depok : RajaGrafindo Persada, hal 2

Tabel 1.1
Beberapa Kejadian Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami Yang Pernah
Terjadi di Indonesia

No	Nama Kejadian	Tanggal Kejadian	Tempat	Korban Jiwa
1.	Bencana tsunami Aceh, gempa 9,3 SR	26 Desember 2004	NAD	126.000 meninggal 30.000 hilang
2.	Gempa Bumi Nias, 8,7 SR	28 Maret 2005	Sumatera Utara	658 meninggal 3.277 luka-luka
3.	Gempa bumi Yogyakarta, 5,9 SR	27 Mei 2006	DIY	6.000 meninggal
4.	Gempa dan Tsunami Bengkulu, 8,5 SR	12 September 2007	Bengkulu	25 meninggal 161 luka-luka
5.	Gempa Tasikmalaya, 7,3 SR	02 September 2009	Jawa Barat	33 meninggal 40 hilang
6.	Gempa bumi Sumatera Barat, 7,6 SR	30 September 2010	Sumatera Barat	6.234 meninggal
7.	Gempa dan Tsunami Pagai, 7,7 SR	25 Oktober 2010	Kepulauan Mentawai	456 meninggal
8.	Gempa bumi Waropen, 7,1 SR	26 Juni 2011	Papua	2 meninggal 10 luka-luka
9.	Gempa Bali, 6,8 SR	13 oktober 2011	Bali	50 luka-luka
10.	Gempa Bumi Parigi Moutong	18 Agustus 2012	Sulawesi Barat	5 meninggal 684 luka-luka
11.	Gempa Bumi Aceh Tengah	02 Juli 2013	NAD	35 meninggal 2418 luka-luka
12.	Gempa Bumi dan Tsunami Lombok Timur, 7,0 SR	05 Agustus 2018	NTT	464 meninggal 829 luka-luka
13.	Gempa Bumi Lombok Timur, 5,8 SR	17 Maret 2019	NTT	4 meninggal 40 luka-luka

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2004-2019

Berdasarkan data kejadian bencana yang terjadi pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa bencana gempa bumi telah banyak merenggut korban jiwa. Bencana gempa bumi di Aceh pada tahun 2004 merupakan bencana yang sangat membuat rakyat Indonesia berduka karena begitu banyak korban dalam peristiwa bencana tersebut.

Perhatian dunia internasional terhadap pengurangan risiko bencana atau yang disebut juga dengan PRB telah nampak nyata dengan adanya

kesepakatan-kesepakatan negara-negara di dunia untuk PRB, mulai dari kerangka aksi *Hyogo (hyogo framework for disaster risk reduction)* tahun 2005-2015 hingga *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* tahun 2015-2030. Sejak *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* disepakati, maka telah memberikan perubahan fokus dalam penanganan bencana. Perubahan tersebut yaitu dari konsep manajemen bencana berubah menjadi manajemen risiko bencana. Adanya perubahan ini lebih di fokus kan pada pencegahan munculnya risiko baru dan mengurangi risiko yang sudah ada serta memperkuat ketangguhan.

Implementasi *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* tahun 2015-2030 dilakukan berdasarkan empat prioritas aksi yaitu: memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana, berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang lebih efektif³. Adanya *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* tahun 2015-2030 maka pelaksanaan program pengurangan risiko bencana secara global mesti mengacu pada kerangka tersebut, termasuk juga dengan negara Indonesia yang memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi di berbagai wilayahnya.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana gempa bumi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan semangko, tepat antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan

3 Juli Safitri Siregar, Adik Wibowo. 2019. Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Kelompok Rentan. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Vol 10 (1) : 30-38

Indo-Australia⁴. Pada tabel 1.2 berikut dapat dilihat indeks risiko bencana per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.2

Indeks Risiko Bencana Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
1.	Kota Padang	209	Tinggi
2.	Agam	209	Tinggi
3.	Pasaman Barat	203	Tinggi
4.	Kepulauan Mentawai	197	Tinggi
5.	Padang Pariaman	197	Tinggi
6.	Pesisir Selatan	190	Tinggi
7.	Pasaman	178	Tinggi
8.	Kota Pariaman	171	Tinggi
9.	Dharmasraya	143	Sedang
10.	Solok	137	Sedang
11.	Solok Selatan	137	Sedang
12.	Kota Bukit Tinggi	130	Sedang
13.	Tanah Datar	125	Sedang
14.	Kota Solok	125	Sedang
15.	Lima Puluh Kota	119	Sedang
16.	Kota Padang Panjang	113	Sedang
17.	Kota Sawah Lunto	113	Sedang
18.	Sijunjung	105	Sedang
19.	Kota Payakumbuh	107	Sedang

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, 8 diantaranya berada dalam kelas risiko tinggi. Kota Padang termasuk ke dalam kategori tinggi dan rentan terhadap bencana yang berada pada urutan pertama.

Kota Padang berada di kawasan Megathrust Mentawai sehingga menjadikannya sumber dari kejadian bencana gempa bumi yang besar dengan

⁴ Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013

magnitudo 8-9,3 SR⁵. Kejadian gempa bumi yang cukup besar pernah terjadi dan telah menimbulkan banyak dampak kerugian dan korban jiwa di Kota Padang. Dapat diingat pada catatan sejarah kejadian bencana gempa bumi di Kota Padang pada tahun 2009 yang berkekuatan 7,6 SR telah menimbulkan korban meninggal dan luka-luka⁶. Berikut pada tabel 1.3 akan menunjukkan jumlah korban jiwa akibat gempa 30 september 2009 di Kota Padang.

Tabel 1.3
Jumlah Korban Jiwa Akibat Gempa 30 September 2009 di Kota Padang

No	Kecamatan	Korban Jiwa			Luka Ringan
		Hilang	Meninggal	Luka Berat	
1.	Lubuk Kilangan	0	5	31	32
2.	Koto Tengah	0	19	23	61
3.	Kuranji	0	36	29	38
4.	Padang Barat	0	81	110	264
5.	Padang Utara	1	28	52	31
6.	Padang Selatan	0	35	42	43
7.	Padang Timur	0	41	109	113
8.	Nanggalo	0	27	10	59
9.	Lubuk Begalung	3	40	24	60
10.	Pauh	0	13	1	32
11.	Bungus Kabung Teluk	0	8	0	38
	Jumlah	4	333	431	771

Sumber : Sigit Setiageni. 2011. *Proses Pemulihan Bencana Gempa Pada Tahun 2009 di Kota Padang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kejadian gempa pada tahun 2009 tersebut telah banyak menimbulkan korban jiwa. Korban jiwa akibat gempa bumi di Kota Padang terdiri dari 4 orang hilang, 383 orang meninggal, 431 orang mengalami luka berat, dan 771 orang mengalami luka ringan. Korban yang

5 Tiurmaida Simandalahi, Ahsan, Ari Prasetyadjati. 2015. Pengetahuan Tentang Isu Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Kelompok Siaga Bencana Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang. *The Indonesian Journal Of Health Science*, Vol 6 (1) :64

6 Ibid

mengalami luka terbanyak berada di Kecamatan Padang Barat dan yang paling sedikit mengalami luka yaitu yang berada di Kecamatan Pauh. Kota Padang merupakan daerah yang memiliki korban terbanyak dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera Barat. Sedangkan pada daerah lainnya hanya berkisaran puluhan jiwa kecuali pada Kabupaten Padang Pariaman yaitu terdapat sebanyak 292 korban jiwa⁷. Banyaknya korban yang terkena dampak bencana gempa bumi tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dan kesiapan pemerintah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi.

Kesiapan pemerintah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dapat dilakukan dengan beberapa dimensi yaitu : *Vulnerability Assessment, Planning, Institutional Framework, Information System, Resource Base, Warning System, Response Mechanisms, Public Education and Training, Rehearsals*⁸. Dari semua indikator ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk pengurangan risiko bencana terhadap masyarakat termasuk juga pada kelompok rentan.

Berbicara mengenai bencana alam siapa pun dapat terancam jiwanya apabila terjadi bencana gempa bumi, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang rentan yaitu anak-anak, orang tua atau lansia, dan disabilitas. Survei yang dilakukan oleh UNISDR mengungkapkan hanya 20% dari orang-orang penyandang disabilitas yang percaya bahwa mereka dapat mengungsi dengan

7Arief Ivana Putra., Zikri Alhadi. 2019. Analisis Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Di Kota Padang (Studi Manajemen Bencana). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 2 (1) : 106

8 Randolph Kent.1994. Disaster Preparedness.

segera tanpa mengalami kesulitan dalam menghadapi bencana yang terjadi secara mendadak⁹. Kelompok disabilitas juga sangat tidak diuntungkan selama evakuasi bencana, karena lingkungan yang dibangun biasanya tidak mengakomodasi mereka yang tidak bisa turun tangga, atau dengan cepat keluar dari gedung bangunan¹⁰. Selain itu ketika kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sering tidak mempertimbangkan kebutuhan anak-anak penyandang cacat ataupun ketika mengembangkan rencana dan kebijakan evakuasi darurat bencana yang akan membuat kelompok disabilitas semakin rentan selama bencana. Sehingga tingkat kematian orang dengan disabilitas lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak disabilitas ketika terjadi bencana¹¹.

Menurut data PUSDATIN Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 11.580.117 penduduk, dan sebagian dari jumlah disabilitas tersebut merupakan korban akibat dari peristiwa gempa bumi pada tahun 2006 di Yogyakarta¹². Adanya korban disabilitas akibat bencana gempa bumi pada tahun 2006 di Yogyakarta dikarenakan pemukiman di Kabupaten Bantul cenderung tidak memiliki struktur yang tidak tahan guncangan gempa serta dengan kualitas bahan yang jelek, sehingga kondisi ini menyebabkan

9 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 2013. UN global survey explains why so many people living with disabilities die in disasters. Retrieved from <http://www.unisdr.org/archive/35032>

10 Christensen, K. M., Blair, M. E., & Holt, J. M. 2007. *The built environment, evacuations, and individuals with disabilities: A guiding framework for disaster policy and preparation*. *Journal of Disability Policy Studies*, Vol 17(4) hal 249–253.

11 Laura M. Stough. 2015. World Report on Disability, Intellectual Disabilities, and Disaster Preparedness: Costa Rica as a Case Example. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, Vol 12 (2) hal 138-146

12 Riskyana Wulandari. 2017. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Menghadapi Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Prodi Manajemen Bencana*, Vol 3 (1) hal 24-25

masyarakat be risiko tertimpa bangunan dan mengalami luka hingga cacat akibat peristiwa gempa bumi tahun 2006 tersebut¹³. Selain itu hal yang sama juga pernah terjadi di Kota Padang, yang mana masyarakat menjadi cacat akibat tertimpa bangunan yang roboh pada saat kejadian gempa bumi Kota padang pada tahun 2009 silam. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua Persatuan penyandang Disabilitas Kota Padang sebagai berikut :

Sebenarnya di lapangan banyak yang tidak terdata waktu peristiwa gempa dulu, ada yang menderita skizofrenia yang perasaan cemas-cemas dan badannya jadi lemas begitu. Selain itu juga ada teman yang mahasiswa, terjepit di tembok dan putus tangannya dan sekarang dia sudah di angkat PNS di Pasaman. ““Wawancara dengan Icun selaku Ketua PPDI Kota Padang, pada tanggal 14 April 2020, pada pukul 14.40 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa masyarakat yang normal dapat menjadi disabilitas akibat dari bencana gempa bumi. Oleh karena itu kelompok disabilitas dapat menjadi orang yang paling berisiko pada saat bencana terjadi¹⁴. Dari kejadian ini pemerintah dapat belajar dan memulai untuk membangun kesiapan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Sehingga kesiapan pemerintah harus di tingkatkan terutama untuk kelompok rentan penyandang disabilitas. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada kelompok disabilitas, khususnya yang ada di Kota Padang kerena daerah yang juga memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana gempa bumi apabila suatu waktu terjadi. Berikut pada tabel 1.4 dapat dilihat data penyandang disabilitas per-kecamatan di Kota Padang.

13 Ibid

14 Ratih ProboSiwi. 2013. Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol 4 (2) hal 5

Tabel 1.4

Data Penyandang Disabilitas Per-kecamatan di Kota Padang Tahun 2015-2017

Penyandang Disabilitas per Kecamatan	2015 (orang)	2016 (orang)	2017 (orang)
Pauh	207	207	210
Koto Tangah	392	392	399
Lubuk Kilangan	145	145	145
Padang Barat	119	119	119
Padang Selatan	222	222	225
Padang Timur	98	98	100
Padang Utara	212	212	227
Lubuk Begalung	256	256	256
Kuranji	172	172	172
Nanggalo	142	142	147
Bungus Teluk Kabung	80	80	80
Jumlah	2.045	2.045	2.070

Sumber : Dinas sosial Kota Padang, 2017 dalam Fatmawati Besse, Naldi Gantika, dan Zennis Helen. 2019. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang. Journal of Social and Economic Research, Vol 3 (2) hal 174*

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa persebaran penyandang disabilitas per-kecamatan di Kota Padang terjadi peningkatan pada tahun 2017. Peningkatan ini membuat Pemerintah Kota Padang untuk lebih mempersiapkan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana gempa bumi agar penyandang disabilitas tidak merasa diabaikan oleh pemerintahnya sendiri. Berikut data jumlah penyandang disabilitas per kategori jenis disabilitasnya di Kota Padang seperti yang ada pada tabel 1.5.

Tabel 1.5

Kategori Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitasnya di Kota Padang
Tahun 2015-2017

Kategori Disabilitas	Tahun		
	2015	2016	2017
Tuna Daksa (Cacat Fisik)	380	380	390
Daksa Berat (Ganda)	135	135	145
Tuna Grahita (<i>Autism/ADHD</i>)	1.150	1.150	1.150
Tuna Rungu Wicara	300	300	305
Tuna Netra	80	80	80
Jumlah	2.045	2.045	2.070

Sumber : Dinas sosial Kota Padang, 2017 dalam Fatmawati Besse, Naldi Gantika, dan Zennis Helen. 2019. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang. Journal of Social and Economic Research, Vol 3 (2) hal 174*

Berdasarkan tabel 1.5 terlihat bahwa, disabilitas yang paling banyak jumlahnya di Kota Padang adalah kategori tuna grahita (autis/ADHD), dan yang paling sedikit jumlahnya adalah kategori tuna netra. Disabilitas yang jumlahnya mengalami kenaikan adalah tuna daksa atau cacat fisik. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya (disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik). Setiap jenis disabilitas membutuhkan penanganan dan kebijakan yang berbeda dalam manajemen risiko bencana, agar dapat mengurangi tingkat risiko bencana yang akan terjadi. Selain itu risiko yang akan dihadapi oleh kelompok disabilitas saat menghadapi bencana gempa bumi akan bertambah karena adanya beberapa permasalahan berikut¹⁵:

1. Belum memaksimalkannya program persiapan bencana yang sensitif penyandang disabilitas.

¹⁵Anang Dwi Santoso, et all. 2015. Disabilitas Dan Bencana (Studi Tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 3 (12) Hal : 2033

2. Partisipasi penyandang disabilitas masih minim dalam pendidikan pengurangan risiko bencana (PRB).
3. Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap materi belajar PRB.
4. Penyandang disabilitas tidak dapat sepenuhnya bertindak cepat dalam penyelamatan diri saat terjadi bencana.
5. Kurangnya pendataan spesifik tentang identitas dan kondisi penyandang disabilitas.
6. Kurangnya fasilitas dan layanan yang aksesibel di tempat atau posko pengungsian.



Kendala yang terjadi diatas mengamanatkan pemerintah untuk mampu memberikan upaya dalam mengurangi risiko bencana berbasis disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi masyarakat rentan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan terhadap bencana. Dipertegas dengan adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana. Selain itu pada saat ini terdapat salah satu upaya pemerintah untuk pemenuhan hak disabilitas dalam pengurangan risiko bencana yaitu dengan adanya konsep pembangunan inklusi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa harus adanya upaya kesiapan dari pemerintah untuk kesiapsiagaan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana gempa bumi.

Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana Pada Ayat (1) menyebutkan bahwa kesiapsiagaan dilakukan melalui¹⁶:

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini.
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
5. Penyiapan lokasi evakuasi.
6. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Untuk kesiapan kesiapsiagaan kelompok disabilitas, diperjelas dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang hak disabilitas dalam mendapatkan informasi yang aksesibilitas akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana dan mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan yang aksesibilitas. Hal ini juga didukung

16 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana

dengan adanya mandat inklusi di dalam kebencanaan. Mandat inklusi merupakan hasil dari tinjauan pustaka terhadap komitmen internasional dan kebijakan nasional mengenai partisipasi bermakna kelompok paling beresiko, khususnya penyandang disabilitas di dalam penanggulangan bencana¹⁷. Jadi kota inklusi merupakan kota yang ramah bagi semua masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, yang didukung dengan fasilitas yang memperhatikan kebutuhan dalam hal ini yaitu kelompok disabilitas. Mandat inklusi telah diperkenalkan dan dijalankan dalam berbagai kegiatan serta diadopsi kedalam peraturan-peraturan pemerintah seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan menjadikan Kota padang sebagai Kota inklusi.

Pemerintah Kota Padang melalui kerja sama dengan UNESCO dan ILO, menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi wali kota untuk kota inklusi ke-6 di Indonesia pada 27 september 2016. Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan jejaring para wali kota untuk kota inklusi sebagai koalisi yang aktif, digerakkan oleh tujuan, mandiri dan berkesinambungan guna mendorong dan menyebarkan kebijakan yang memajukan disabilitas¹⁸. Peraturan Daerah Kota Padang dan kerja sama Pemerintah Kota Padang untuk kota inklusi tersebut mengamanatkan agar pemerintah daerah siap dalam melakukan kegiatan terkait kesiapsiagaan kepada masyarakat khususnya kelompok disabilitas.

¹⁷ Arbeiter Samariter Bund. 2018. Penerapan mandat inklusi dalam penanggulangan bencana. ASB Indonesia and The Philipines.

¹⁸ Search ilo.org. 30 september 2016. Lebih Banyak Kota Berkomitmen Menjadi Kota Inklusi Di Indonesia. Di akses Pada 25 Februari 2020, dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541609/lang--en/index.htm

Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang merupakan lembaga yang fokus menangani kebencanaan di Kota Padang. BPBD Kota Padang dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB), Mercy Corps, dan Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI). Dalam kegiatan sosialisasi untuk kelompok disabilitas BPBD Kota Padang juga dibantu oleh Dinas Sosial Kota Padang sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap disabilitas di Kota Padang serta organisasi penyandang disabilitas Kota Padang untuk membantu dalam berkomunikasi ketika melakukan sosialisasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi bagi penyandang disabilitas, seperti: Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gerakan Kesejahteraan Untuk Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN), dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

Pemerintah Kota Padang telah melakukan kegiatan kesiapsiagaan yang dimaksud untuk mengantisipasi dampak risiko akibat bencana gempa bumi yang akan dihadapi kelompok disabilitas, seperti yang disampaikan oleh Kabid PK BPBD Kota Padang, sebagai berikut:

“Kami sudah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi disabilitas seperti kegiatan pelatihan, dan juga di kegiatan simulasi bencana kelompok difabel juga kami libatkan. “(Wawancara dengan Henry selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang Pada Tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 09.10 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, kegiatan kesiapsiagaan ini merupakan pelatihan peningkatan kapasitas PRB berbasis masyarakat secara inklusi yang dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Pelatihan Peningkatan Kapasitas PRB Berbasis Masyarakat Secara Inklusi



Sumber : BPBD Kota Padang Tahun 2019

Kegiatan yang dilakukan di Whiz Prime Hotel Padang pada tanggal 1-2 Oktober 2019 hanya diikuti oleh organisasi penyandang disabilitas dan guru sekolah luar biasa. Kegiatan ini dilakukan BPBD Kota Padang untuk meningkatkan pemahaman tentang upaya pengurangan risiko bencana masyarakat inklusi khususnya penyandang disabilitas.

Selain pelatihan BPBD Kota Padang juga telah melakukan penilaian kerentanan terkait bahaya dan risiko terhadap bencana yang dihadapi oleh masyarakat Kota Padang. Penilaian kerentanan berfungsi sebagai titik awal untuk

menentukan jenis rencana yang harus dikembangkan sebagai bagian dari strategi kesiapan bencana daerah¹⁹.

Penilaian kerentanan yang dilakukan oleh BPBD sebagai bentuk kesiapsiagaan mengenai kecenderungan bencana dan masyarakat yang terdampak oleh bencana salah satunya gempa bumi. Untuk penilaian kerentanan wilayah Kota Padang, BPBD Kota Padang telah memiliki peta kajian risiko bencana. Pada gambar 1.2 menunjukkan peta risiko bencana gempa bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.



Sumber : Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Padang Tahun 2013

19 Randolph Kent. 1994. Disaster Preparednes. New York, Ganeva : UNDP/DHA

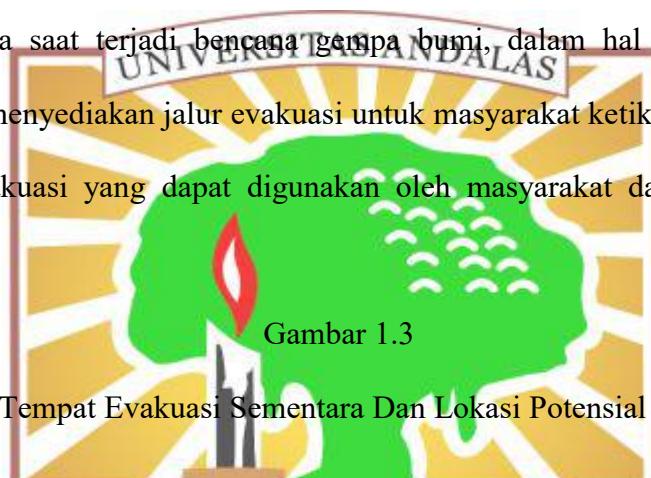
Seperti yang terlihat pada gambar 1.2 di dalam peta risiko bencana gempa bumi di Kota Padang, terdapat wilayah yang diberi warna hijau, kuning, dan merah. Hijau menandakan risiko bencana yang rendah, kuning menandakan risiko bencana sedang dan merah menandakan risiko bencana yang tinggi. Kajian risiko bencana yang dibuat oleh BPBD Kota Padang merupakan kajian untuk masyarakat secara umum dan BPBD Kota Padang belum memiliki kajian risiko bencana untuk kelompok disabilitas. Survei kajian risiko bencana tersebut dapat menjadi bahan bagi BPBD Kota Padang dalam membuat perencanaan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat Kota Padang termasuk didalamnya kelompok disabilitas.

Kesiapan pemerintah dalam kesiapsiagaan bencana juga harus didukung oleh sistem informasi. BPBD Kota Padang memiliki Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS). PUSDALOPS memiliki semua data informasi mengenai kebencanaan di Kota Padang. PUSDALOPS berfungsi sebagai pusat operasi, pengendalian, dan peringatan, di mana informasi mengenai gempa bumi, ancaman potensi tsunami atau kejadian tsunami di analisis dan disebarluaskan. PUSDALOPS juga memberikan peringatan dini ketika bencana terjadi. Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Umum BPBD Kota Padang, yang mengatakan bahwa:

“Pada saat ini alat komunikasi yang kami gunakan untuk peringatan dini bencana gempa bumi baru terbatas kepada *Early Warning System* (EWS).“(Wawancara dengan Firdaus selaku Kasubag Umum BPBD Kota Padang Pada Tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 08.30 WIB)

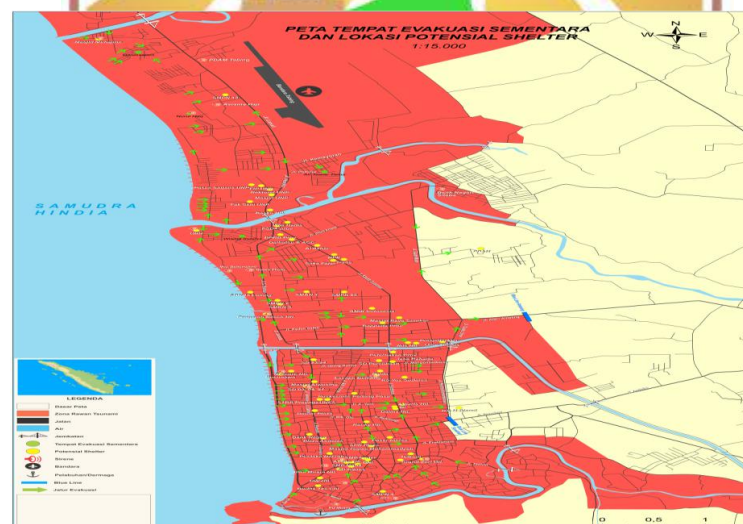
Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Kota Padang memiliki alat komunikasi untuk peringatan dini benca gempa yaitu EWS. Alat ini merupakan peringatan dini bagi masyarakat secara umum dan tidak terkhusus untuk kelompok disabilitas.

Hal selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kesiapan menghadapi bencana gempa bumi yaitu dengan adanya mekanisme respons yang dilakukan pada saat terjadi bencana gempa bumi, dalam hal ini BPBD Kota Padang telah menyediakan jalur evakuasi untuk masyarakat ketika bencana terjadi. Jalur peta evakuasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3

Peta Tempat Evakuasi Sementara Dan Lokasi Potensial Shelter



Sumber : Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Padang Tahun 2013

Untuk Kota Padang terdapat tiga bangunan tinggi sebagai tempat evakuasi sementara yang berlokasi di Ulak Karang, Parupuk Tabing dan Tabing yang

dengan daya tampung sekitar 5.000 jiwa per lokasi²⁰. Namun peneliti menemukan belum terdapat jalur evakuasi khusus disabilitas.

Ketika semua kesiapan sudah dilakukan oleh pemerintah terdapat satu hal yang tidak boleh dilewatkan yaitu melakukan uji coba dalam bentuk simulasi. Pemerintah Kota Padang pada tahun 2016 melakukan simulasi evakuasi gempa yang berlokasi di shelter Nurul Haq dengan melibatkan masyarakat dan anak sekolah serta semua *stakeholders* yang ada seperti LSM, PMI, ORARI, KSB, Forum PRB, dan masyarakat difabel Kota Padang²¹. Kegiatan simulasi ini bertujuan agar masyarakat dan kelompok disabilitas mengetahui peran dan tanggung jawabnya sebelum kejadian bencana yang nyata tersebut terjadi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti ingin melihat lebih lanjut mengenai kesiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi pada tahap pra bencana. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada kelompok rentan yaitu kelompok disabilitas di Kota Padang dengan judul “Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Gempa Bumi Bagi Kelompok Disabilitas Di Kota Padang ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan dan fenomena yang ada pada latar belakang maka dalam hal ini peneliti merumuskan permasalahan: Bagaimana Kesiapan

20 Ikhwan Wahyudi. 2019. Refleksi 10 Tahun Gempa Padang dan Upaya Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Bencana. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/296020/refleksi-10-tahun-gempa-padang-dan-upaya-meningkatkan-kewaspadaan-terhadap-bencana>. (Di akses pada 25 Januari 2019)

21 Roni Ekha Putera. 2018. Op Cit, hal 106

Pemerintah Kota Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Gempa Bumi Bagi Kelompok Disabilitas Di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesiapan pemerintah kota dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi bagi kelompok disabilitas di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna bagi peneliti untuk mengembangkan serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari yang nantinya juga dapat untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti terkait kesiapan pemerintah kota dalam kesiapsiagaan penyandang disabilitas menghadapi bencana gempa bumi di Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak, terkhususnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang untuk dapat menyiapkan kelompok penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana gempa bumi yang sewaktu-waktu terjadi.

